



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI



Oleh :

NURATIKA
NIM. 12070522843

UIN SUSKA RIAU

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Strata 1
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

NURATIKA
NIM. 12070522843

UIN SUSKA RIAU

PRODI ADMINISTRASI NEGARA S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Atika
 Nim : 12070522843
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pengawasan kinerja pegawai pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak


**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial


Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Atika
 Nim : 12070522843
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Pengawasan kinerja pegawai pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak
 Tanggal Ujian : Selasa, 14 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, M.Soc. Soc
 NIP. 1983 0409 202321 1 016

Penguji II
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIP. 19950618 202012 1 010

Sekretaris
Virna Museliza, SE, M.Si
 NIK. 130 712 073






UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 22 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Atika
NIM : 12070522843
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai APT, 07 November 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengawasan Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat
Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Siak.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NUR ATIKA

NIM: 12070522843

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAK

Oleh :

Nur Atika
12070522843

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur Negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu agar aparatur atau pegawai pemerintahan dapat mencapai kinerja yang baik maka diperlukan fungsi pengawasan yang baik pula. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang baik dan membina, maka diharapkan kinerja pegawai negeri sipil yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan kinerja yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan disiplin kerja pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memperbaiki kinerja pegawai dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan hal-hal khusus dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta observasi. Dengan hasil yang menyatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan melalui evaluasi rutin, pemberian arahan secara langsung, serta monitoring yang intensif terhadap pelaksanaan tugas pegawai terbukti efektif dalam menjaga disiplin dan memastikan bahwa pegawai tetap fokus pada target yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan yang transparan dan berkesinambungan memberikan pegawai pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi dan tanggung jawab mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih maksimal.

Kata Kunci : Pengawasan dan Kinerja



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

***SUPERVISION OF EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE SECRETARIAT
OFFICE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL
(DPRD) OF SIAK DISTRICT***

By:

**Nur Atika
12070522843**

Supervision is an important aspect in the management of the State apparatus so that all tasks, functions, and programs carried out by the government can run properly. The supervisory function is also very influential on performance because the supervisory process can control the implementation of predetermined policies. Therefore, in order for government officials or employees to achieve good performance, a good supervisory function is also needed. Through a good supervision policy and fostering, it is hoped that the performance of civil servants who are currently considered weak, especially in the field of supervision, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure. This research aims to find out how the existing performance supervision system, identify weaknesses and challenges, and provide recommendations for improving employee supervision and discipline at the Siak Regency DPRD Secretariat Office. Thus, it is expected that an effective strategy can be found to improve employee performance and support the achievement of organizational goals. In this paper the author uses qualitative research methods, which describe specific things with data obtained through interviews and documentation and observation. With the results stating that Supervision carried out through regular evaluations, giving direct directions, and intensive monitoring of the implementation of employee duties has proven effective in maintaining discipline and ensuring that employees remain focused on predetermined targets. In addition, transparent and continuous supervision gives employees a clear understanding of their expectations and responsibilities, which in turn can encourage them to work more optimally.

Keywords: *Supervision and Performance*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh
Alhamdulillahhirabbil'alam,*

Dengan menyebut nama Allah SWT., yang maha pengasih lagi maha penyayang, Penulis ucapkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang diberikan Allah SWT., dimana Allah SWT telah meridoi, memberkati penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAK”** Shalawat serta salam penulis hadiahkan buat arwah jujungan alam, yakni baginda rasulullah Muhammad SAW, dengan melafazkan *“Allahhumma Shalli ‘ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad.”*

Dengan segala kerendahan hati dan keinsyafan selaku hamba yang penuh dengan kekurangan, maka karya kecil ini senantiasa penulis persembahkan kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi, serta selalu ada disaat saya susah maupun senang yaitu ayahanda **Muhammad Nur** dan ibunda **Siti Aisyah** yang senantiasa berdo’a untuk kemudahan dan keberhasilan ananda dalam meraih cita-cita, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, mengorbankan tulang mereka demi ananda yang tidak pernah mengenal lelah, serta selalu berkata ada ketika ananda meminta. Tak lupa juga terimakasih kepada kakak tersayang **Nur Shuhada** beserta Suami **Jasmiandi**, dan abang tersayang **Muhammad Hamdan** yang selalu memotivasi dan memberi semangat kepada penulis. Tak lupa pula dua kponakan penulis **Shauqy Pradipta Amzari** dan **Shauqy Zaydan Hanif** yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu memberi kebahagiaan dan senyuman kepada penulis. Tak lupa juga Etek penulis **Yulinar** dan suami **Retno Rahman** yang selalu menjaga penulis, memotivasi dan membimbing penulis selama penulis masih dalam masa perkuliahan hingga selesai.

Selain itu penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI. M.A selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

Ibu Irdayanti S. IP. M. A selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang berada di jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Pegawai dan staff karyawan, yang bekerja di Kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak yang telah memberikan ilmu, membantu dan telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

9. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah penulis anggap sebagai saudara yang selalu memberikan semangat dan dukungan yaitu Annisa Fitri, Kamisa, Willy Witriani, Adila Mailani, Juci Fitri, Heni Haryani, dan Rani Tri Astuti.

10. Teman-teman seperjuangan yang sama sama berjuang dalam mengejar cita-cita yaitu Maharani Juwita, Dwi Fany Errizal, Wulandari, Dian Mir'atun Najah dan Siska Apriani.

11. Ucapan terimakasih kepada Teman sekaligus sahabat penulis Aldo Pratama yang selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah penulis dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

12. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara terkhususnya lokal D angkatan 20

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, J anuari 2025
Penyusun

NUR ATIKA
NIM. 12070522843



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
Isi	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian.	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.5. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
2.1 PENGAWASAN.....	22
2.1.1. Pengertian Pengawasan.....	22
2.1.2. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	23
2.1.3. Tujuan Pengawasan.....	28
2.1.4. Fungsi-Fungsi Pengawasan.....	31
2.1.5. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif.....	33
2.2 KINERJA PEGAWAI.....	37
2.2.1. Kinerja.....	37
2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.....	38
2.2.3. Sasaran Kerja Pegawai	39
2.2.4. Perilaku Kerja.....	40
2.3 Pandangan Islam Terhadap Pengawasan Kinerja Pegawai	41
2.4 Penelitian Terdahulu	43
2.5 Definisi Konsep.....	49
2.6 Konsep Operasional	50
2.7 Kerangka Berpikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Jenis Penelitian.....	52
3.2. Lokasi dan waktu Penelitian.....	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Jenis Dan Sumber Data	53
3.3.1. Data Primer	53
3.3.2. Data Sekunder	53
3.4 Teknik pengumpulan data	54
3.5 Teknik Sampling	55
3.6 Instrumen Penelitian.....	56
3.7 Validitas Data.....	56
3.8 Teknik Analisis Data.....	57
3.9 Subjek Penelitian.....	59
3.10 Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN	61
4.1. Gambaran Umum Kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Siak	61
4.1.1. Sejarah berdirinya instansi	61
4.1.2. Bagian dan unit kerja	62
4.1.3. Struktur Organisasi Unit Kerja	62
4.1.4. Visi dan misi	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1. Pengawasan Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak	65
5.1.1. Pengawasan Kinerja	66
5.1.2. Mentoring Harian	68
5.1.3. Evaluasi Hasil Kerja.....	71
5.1.4. Pelatihan dan Pengembangan.....	73
5.1.5. Komunikasi dan Umpan Balik	75
5.1.6. Penghargaan dan Sanksi.....	77
5.2. Faktor penghambat pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai dikantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak	80
5.2.1. Pengawasan kinerja	80
5.2.2. Mentoring harian	83
5.2.3. Evaluasi hasil kerja.....	87
5.2.3. Pelatihan dan pengembangan.....	89
5.2.4. Komunikasi dan umpan balik.....	91
5.2.5. Penghargaan dan sanksi.....	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	95



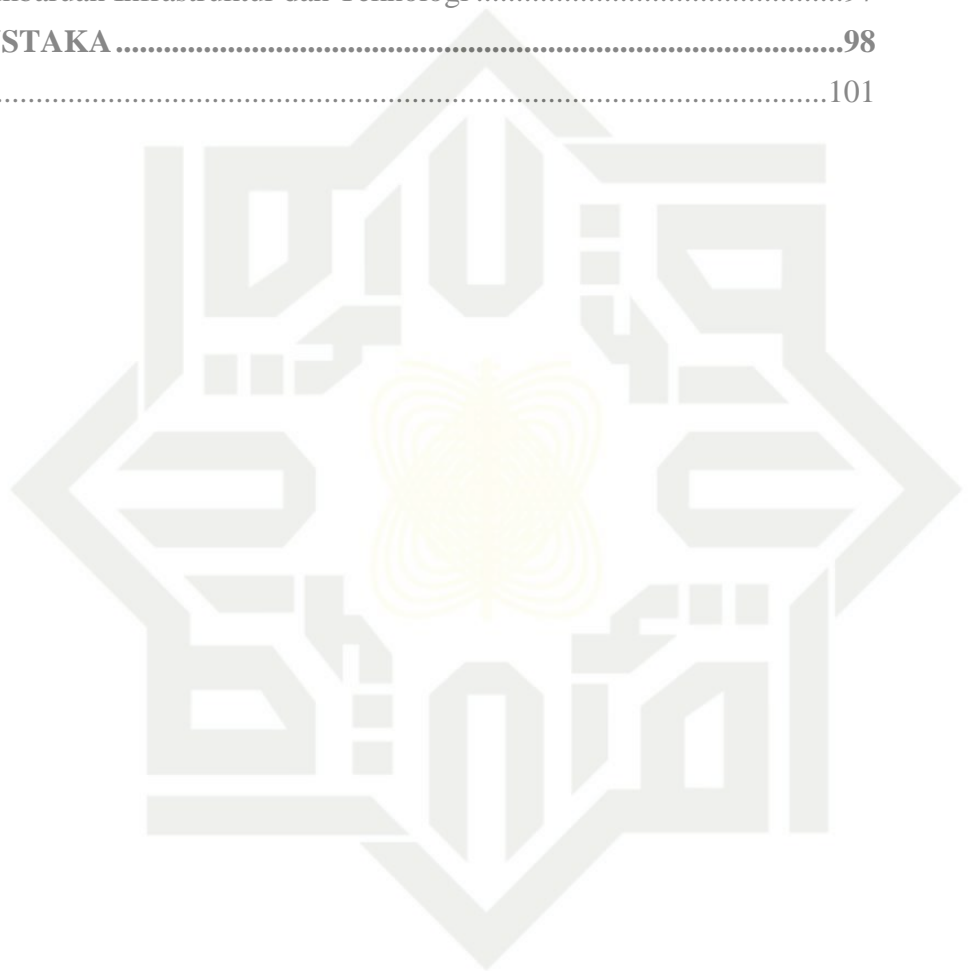
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1. KESIMPULAN	95
6.2. SARAN	96
6.2.1. Penguatan Sistem Pengawasan.....	96
6.2.2. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi Antarbagian.....	96
6.2.3. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	97
6.2.4. Pembaruan Infrastruktur dan Teknologi	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	101



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
<u>Tabel 1.1</u>	7
<u>Tabel 1.2</u>	13
<u>Tabel 1.3</u>	15
<u>Tabel 1.4</u>	15
<u>Tabel 1.5</u>	16
<u>Tabel 1.6</u>	17
<u>Tabel 2.1</u>	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Adanya otonomi daerah yang diwujudkan dengan desentralisasi dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya baik menyangkut perumusan kebijakan maupun implementasi program daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah. Dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat berarti bagi dinamika, perkembangan dan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan wajar dan lancar, sehingga banyak para ahli manajemen mempunyai pandangan tersendiri terhadap pengawasan. Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya efektifitas dan efisien kerja serta pencapaian hasil kerja (kinerja) dalam satu organisasi dengan maksud untuk mencegah kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu, dana, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

"Kinerja pegawai yang tinggi berkorelasi dengan motivasi, kepuasan kerja, dan kondisi lingkungan kerja yang kondusif." Herzberg, F. (1968). (Nopita sari siregar 2017). Pengawasan kinerja pegawai di instansi pemerintah merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi operasional (Iskandar, 2019). Selain itu, menurut Nurhayati dan Setiawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2020), sistem pengawasan yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai di instansi pemerintah. Penelitian oleh Santoso et al. (2021) menunjukkan bahwa pengawasan kinerja yang efektif berdampak positif pada produktivitas pegawai. Pengawasan kinerja yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Arifin, 2020). Prasetyo dan Lestari (2019) juga menekankan bahwa penerapan sistem pengawasan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai di instansi pemerintah. Selain itu, studi oleh Putra, Yulia, dan Setiadi (2018) menunjukkan bahwa pengawasan yang sistematis dan terstruktur berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pegawai.

Pengawasan dalam konteks manajemen melibatkan proses monitoring, pengukuran, dan evaluasi kinerja pegawai. Menurut Robbins dan Coulter (2018), pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif melibatkan umpan balik yang teratur, pelatihan bagi supervisor, dan penggunaan alat pengawasan yang memadai.

Pentingnya pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam sebuah usaha karena kita harus memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Manajemen pengawasan untuk Aparatur Sipil Negeri sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa “yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan pegawai adalah jabatan pengawas sebagaimana bertanggung



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang meliputi pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan Pembangunan”.

Pengawasan bisa bersifat positif dan negatif, bersifat positif apabila pengawasan tersebut mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi atau muncul lagi. Pengawasan bersifat negatif apabila pengawasan tersebut dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, tanpa memberikan arahan yang benar. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha suatu pencapaian. Untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang baik dan bermutu tinggi maka diperlukan pengawasan yang baik.

Selanjutnya, prestasi kerja pegawai juga dapat dipengaruhi oleh adanya pengoptimalan pengawasan yang dilakukan pimpinan kepada pegawainya, karena dengan dilakukannya hal tersebut maka potensi kinerja yang dimiliki oleh seorang pegawai akan dimaksimalkan, sehingga tercapainya tingkat prestasi yang tinggi, dengan tingginya hasil kerja pegawai maka akan berdampak kepada tingginya kinerja suatu organisasi. Karena pada hakekatnya sikap pemimpinlah yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau instansi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi atau lembaga.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Undang-undang ini mencakup berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk pengaturan mengenai pengawasan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur Negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu agar aparatur atau pegawai pemerintahan dapat mencapai kinerja yang baik maka diperlukan fungsi pengawasan yang baik pula. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang baik dan membina, maka diharapkan kinerja pegawai negeri sipil yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Pegawai merupakan aset utama yang ada dalam sebuah organisasi yang mempunyai peran strategis di dalam suatu organisasi yakni sebagai perencana, pemikir, dan juga sebagai pengendali kegiatan organisasi. Kinerja yang dimiliki oleh seorang pegawai diperoleh melalui usaha dan kerja keras serta melalui proses yang panjang, untuk itu setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) tentang pokok-pokok Kepegawaian (1999:4) yaitu : “Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, profesional, dan merata dalam penyelenggaraan sebuah tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan.”

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik maka kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja pegawai sangat berperan dalam kemajuan tersebut, karena pada dasarnya organisasi dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya adalah perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menyebutkan bahwa sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur peayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pengawasan kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak merupakan faktor krusial untuk memastikan fungsi administratif dan legislatif berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan telah muncul, seperti ketidakefektifan dalam sistem pengawasan, disiplin kerja yang kurang, serta motivasi pegawai yang bervariasi. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Sebagai lembaga yang mendukung fungsi DPRD, Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan administratif dan teknis bagi anggota dewan. Pengawasan yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas, akuntabilitas, dan kualitas kerja pegawai. Namun, ketidakmampuan untuk menerapkan pengawasan yang memadai dapat menyebabkan inefisiensi, rendahnya disiplin kerja, dan penurunan kinerja keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Tabel 1.1

Tabel SOP Pengumpulan Data Kinerja

KEGIATAN	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIAK	KEPALA BAGIAN	PELAKSANA			PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
			PERENCANA AHLI MUDA	ANALISIS KEUANGAN PUSAT	DAERAH EVALUASI KINERJA			
Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada kassubag, OPD dan instansi.	Mulai					Rencana aksi, perjanjian kinerja	30 menit	Disposisi
Merekap laporan Kinerja triwulan						Kinerja aksi dan disposisi perjanjian kinerja	120 Hari	Disposisi
Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi rencana aksi, perjanjian kinerja dan laporan progress bulanan	30 menit	Draft Laporan Kinerja
Menyusun Laporan Kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	25 menit	Draft Laporan Kinerja
Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	30 menit	Draft Laporan Kinerja
Merekap & (dua) laporan triwulan untuk menyusun laporan						Catatan Pembagian Tugas	30 menit	Draft Laporan Kinerja
Menyusun laporan semester dan laporan tahunan		Ya				Data Laporan kinerja triwulan	120 Hari	Draft Laporan Kinerja
Mensosialisasikan laporan semester		Tidak				Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	60menit	Draft Laporan Kinerja
Menyusun 2 laporan semester menjadi laporan kinerja tahunan						Laporan Kinerja Triwulan	20 menit	Draft Laporan Kinerja
			selesai					

Sumber : Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kab. Siak 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.Di



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak dan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Siak. Hal ini menjadikan permasalahan yang memberi dampak kepada pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Siak yang teridentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
2. Masih rendahnya SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Siak dengan penempatan staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang akademis pendidikannya.
3. Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Siak khususnya dibidang informasi dan Tehnologi.

Dalam pelaksanaan secretariat pastinya ada jenis pelayanan yang diantaranya itu pelayanan internal dan eksternal:

1. Pelayanan Internal

Pelayanan internal di Sekretariat DPRD Kabupaten Siak berfokus pada dukungan administratif dan operasional bagi anggota DPRD dan staf di lingkungan Sekretariat. Jenis-jenis pelayanan internal tersebut antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi

1) Pengelolaan Surat Menyurat

Pengelolaan surat masuk dan keluar untuk memastikan komunikasi yang baik dalam lingkungan legislatif.

2) Pengarsipan dan Dokumentasi

Mengatur arsip dan dokumentasi hasil rapat, keputusan, serta kegiatan DPRD untuk memastikan mudahnya akses dan pencarian dokumen.

b. Fasilitasi Rapat dan Sidang

1) Persiapan Rapat dan Sidang DPRD

Menyediakan fasilitas untuk rapat dan sidang DPRD, mulai dari penyusunan agenda, pengaturan tempat, hingga penyediaan materi rapat.

3) Notulen Rapat

Menyusun notulen rapat untuk mendokumentasikan setiap pembahasan yang terjadi selama rapat atau sidang.

c. Pelayanan Keuangan dan Anggaran

4) Pengelolaan Anggaran DPRD

Menangani anggaran untuk operasional, kegiatan, serta dana yang dialokasikan untuk anggota DPRD, termasuk tunjangan dan perjalanan dinas.

5) Laporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kebutuhan pemeriksaan dan evaluasi.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Pelayanan Pegawai

Mengelola kepegawaian, termasuk administrasi gaji, absensi, dan pelatihan atau pengembangan kapasitas staf.

2) Pemberian Informasi

Memberikan informasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab kepada anggota DPRD serta staf mengenai prosedur dan kebijakan yang berlaku.

2. Pelayanan Eksternal

Pelayanan eksternal berfokus pada hubungan Sekretariat DPRD dengan masyarakat, pemerintah daerah, lembaga eksternal, dan media.

Jenis-jenis pelayanan eksternal antara lain:

a. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

1) Saluran Aspirasi Masyarakat

Menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau saran terkait kebijakan dan program pemerintah daerah.

2) Tindak Lanjut Pengaduan

Menangani pengaduan masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas masalah yang dilaporkan.

b. Penyebaran Informasi Kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Transparansi Informasi

Menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diambil oleh DPRD Kabupaten Siak kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik.

2) Media Sosial dan Website

Menggunakan media sosial dan website resmi untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan, keputusan, serta kebijakan DPRD.

b. Koordinasi dengan Pemerintah dan Lembaga Eksternal

1) Hubungan dengan Eksekutif

Berperan sebagai penghubung antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program.

2) Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Melakukan koordinasi dengan instansi lain, organisasi masyarakat, atau lembaga non-pemerintah untuk kerja sama dalam program-program pembangunan.

c. Pelayanan Kunjungan dan Rapat dengan Pihak Luar

1) Fasilitas Kunjungan

Menyediakan fasilitas dan dukungan bagi pihak luar yang berkunjung untuk keperluan kerja sama atau studi banding terkait kegiatan legislatif.

2) Rapat Kerja dengan Instansi Lain

Menyelenggarakan rapat kerja dengan pihak luar untuk membahas isu-isu yang relevan dengan kebijakan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2

Tingkat Pendidikan pegawai kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SLTP	5	3,2
2.	SLTA	72	46,7
3.	Diploma III	4	2,6
4.	Strata I	69	44,8
5.	Strata II	4	2,6
Jumlah		154	100

Sumber : Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kab. Siak 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai pada kantor Sekretaria dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten siak yakni pegawainya yang lulusan Strata I yaitu 69 orang dari 154 orang jumlah pegawai atau sekitar 44,8% dari seluruh jumlah pegawai sedangkan sebagian kecil (2,6%) adalah pegawai dengan latar belakang Pendidikan Strata II dan SLTP. Jika dilihat dari latar pendidikan yang dimiliki pegawai pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuoaten Siak, maka dikatakan cukup baik karna dilihat dari jenjang pendidikan masing-masing pegawai, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka agar dapat bekerja lebih optimal didalam menjalankan roda pemerintahan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Kabupaten Siak. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hamper sama dengan DPRI maupun DPRD Kabupaten Siak, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberikan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkat kankualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyiapkan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bentuk pelayanan pada kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak antara lain meliputi Melaksanakan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kabupaen Siak.

Dalam melaksanakan tupoksi sekretariat DPRD Kabupaten siak jumlah personil yang berstatus sebagai ASN berjumlah 42 orang, pada kondisi Per Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3

Personil yang berstatus sebagai pegawai ASN DPRD Kabupaten Siak berdasarkan jabatan, Formasi, Terisi dan Keterangan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	3	3	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4	Fungsional Umum	37	37	-

Sumber: lakip sekretariat DPRD Kab.Siak

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.4

Personil yang berstatus sebagai pegawai ASN DPRD Kab.Siak berdasarkan jenjang k kepangkatan/golongan

No.	Jabatan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	0	0	0
2.	Golongan IV/b	2	1	3
3.	Golongan IV/a	1	0	1
4.	Golongan III/d	1	4	5
5.	Golongan III/c	7	2	9
6.	Golongan III/b	2	0	2
7.	Golongan III/a	1	4	5
8.	Golongan II/d	3	8	11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Golongan II/c	2	0	2
10.	Golongan II/b	2	0	2
11.	Golongan II/a	1	0	1
12.	Golongan I/c	1	0	1
Jumlah		23	19	42

Sumber: lakip sekretariat DPRD Kab.Siak

Selain pegawai baik PNS atau Naban, Sekretariat DPRD Kabupaten Siak juga memiliki sumber daya manusia lain diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.5

Distribusi Tenaga ahl fraksi, tenaga ahli komisi, tenaga ahli pimpinan, tenaga staf sekretariat fraksi

No.	Uraian	Jumlah Orang
1.	Tenaga Ahli Fraksi	8
2.	Tenaga Ahli Komisi	4
3.	Tenaga Ahli Pimpinan	4
4.	Tenaga Ahli Honorer	120

Sumber: lakip sekretariat DPRD Kab.Siak

Sesuai dengan peraturan bupati (PERBUP) kabupaten siak nomor 36 tahun 2022 perubahan ketiga atas peraturan bupati siak nomor 128 tahun 2017 tentang analisis jabatan dan beban kerja pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah diketahui bahwa kebutuhan personil disekretariat DPRD kabupaten siak sesuai dengan beban kerja yang ada adalah 42 (empat puluh dua).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.6

Rekapitulasi absensi pegawai pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak

No.	Bulan	Jumlah pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah pegawai yang tidak hadir
1.	Januari	154	21	9
2.	Februari	154	22	7
3.	Maret	154	21	5
4.	April	154	14	8
5.	Mei	154	21	7
6.	Juni	154	20	10
7.	Juli	154	20	5
8.	Agustus	154	22	9
9.	September	154	20	5
10.	Oktober	154	21	8
11.	November	154	22	13
12.	Desember	154	19	6

Sumber : Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kab. Siak

Dari tabel 1.6 diatas dapat diketahui bahwa masih adanya absensi pegawai yang belum optimal dan masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari data pada bulan November yaitu 14 orang tidak masuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor. Dengan tingkat absensi yang cukup tinggi tersebut, baik itu dari alfa, sakit, izin dan izin karena dinas luar mengakibatkan jam kerja berkurang. Pada kondisi ini diasumsikan bahwa disiplin pegawai dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah kurang maksimal, budaya kerja dan kepuasan kerja yang kurang baik mengakibatkan semakin rendah tingkat disiplin tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan kinerja yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan disiplin kerja pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memperbaiki kinerja pegawai dan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dari latar belakang diatas yang ditemui dilapangan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAK"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja pegawai dikantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak?
2. Apakah faktor penghambat pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak?

1.3. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai dikantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis Untuk penulis penelitian ini merupakan persyaratan yang ditempuh untuk meraih gelar sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan penulis, kemudian dapat mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan sekretaris dewan.
2. Manfaat Bagi pengambil keputusan Penelitian ini dijadikan Sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan Pengawasan Pegawai negeri sipil pada kantor Sekretriart Dewan DPRD Kabupaten Siak dalam menunjang fungsi dan tugasnya serta tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya kantor Sekretriart Dewan DPRD Kabupaten Siak.
3. Manfaat Bagi Akademik Semoga skripsi ini menjadi sebuah rujukan dan dapat membagikan infomasi yang kemudian dapat dijadikan referensi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai gaya kepemimpinan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten siak.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, konsep operasional, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum kabupaten Siak dan gambaran umum Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Siak.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Pengawasan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak dan apa saja faktor penghambat Kinerja pegawai pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran serta daftar pustaka dan lampiran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PENGAWASAN

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Berkaitan dengan bahasan tentang pengertian pengawasan tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa teori, konsep, maupun bahasan serta pendapat dari para ahli di bidangnya. Samsudin (2005:299) mengemukakan sebagai berikut. “Pengawasan sumber daya manusia adalah kegiatan manajemen dan mengadakan pengamatan terhadap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan organisasi, pasaran sumber daya manusia yang ada dan memungkinkan, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang ada di pasaran tenaga kerja, kemampuan individual dari setiap sumber daya manusia dalam organisasi, upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi, semangat kerja sumber daya manusia, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini dapat dikemukakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sebagai salah satu fungsi manajemen,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan pada hakikatnya harus menegakkan pilar-pilar efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas serta sesuai aturan dan tepat sasaran. Pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota-anggota organisasinya, adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang di bebaskan kepadanya. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapinya, apabila ada maka sejauh mana pengarnya terhadap pelaksanaan tugas guna tercapainya tujuan organisasi.

Pimpinan perlu mengetahui apa yang telah dan sedang dikerjakan anak buahnya di kantor, apa yang telah terjadi di dalam unit yang ia pimpin agar dapat melangkah lebih lanjut. Atau diperlukan perbaikan-perbaikan maupun penyesuaian, serta perubahan dalam organisasi yang ia kendalikan. Lebih lanjut Samsudin (2005:299) menjelaskan hal-hal sebagai berikut.” Dengan memerhatikan berbagai aspek pengawasan sumber daya manusia, maka perlu adanya ketentuan- ketentuan standar minimal dalam berbagai aspek sebagai pedoman tolok ukur. Tolok ukur semacam ini penting untuk memungkinkan sasaran- sasaran yang diinginkan pada setiap aspek dapat dicapai dengan baik dan terkendali.”

2.1.2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Menurut Nawawi & Martini (1994:110), dalam melaksanakan pengawasan sebagai unsur dalam fungsi primer administrasi, dapat dibedakan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan tidak langsung. Berikut penjelasan dari kedua jenis pengawasan tersebut adalah:

- A. Pengawasan langsung Pengawasan ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung ditempat pelaksanaannya. Bentuk ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan, peninjauan, pengamatan, pemeriksaan dan pengecekan. Pengawasan dapat dilakukan dengan memberitahukan kepada pihak yang akan diawasi mengenai waktu dan bidang yang akan dipantau. Di samping itu mungkin pula dilakukan sebagai kegiatan surprise yakni secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga sering juga disebut Inspeksi Mendadak (Sidak). Kedua cara itu memiliki kebaikan dan kelemahan masing-masing, sehingga hanya bermanfaat sesuai dengan tujuan dilakukannya pengawasan.
- B. Pengawasan tidak langsung Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan berlangsung, baik dilakukan dari jauh maupun di tempat pelaksanaannya. Bentuk ini dapat dilakukan dengan cara mencari informasi dari pihak ketiga, meminta pertanggungjawaban atau laporan kegiatan. Dengan demikian berarti pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa laporan atau pertanggungjawaban adalah pengawasan tidak langsung dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung di tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menghimpun informasi dari orang lain yang tidak ikut dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatannya, namun diperkirakan ia mengetahui proses atau kejadiannya.

Selanjutnya dilihat dari segi pelaksanaan pengawasan, maka dapat dibedakan dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Berikut penjelasan dari kedua jenis pengawasan tersebut adalah:

A. Pengawasan intern Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas dari dalam organisasi itu sendiri, pengawasan ini terdiri dari:

1) Pengawasan melekat (Built-in control)

Pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh administrator sebagai pimpinan, meskipun dapat pula dilakukan oleh beberapa pembantu yang tidak melembaga. Pengawasan melekat dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, mungkin pula dilakukan oleh administrator sebagai pimpinan dengan membentuk Panitia atau Tim Pemeriksa, yang dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya memeriksa kasus tertentu.

2) Pengawasan aparat intern

Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan terhadap unit/satuan kerja lainnya, baik yang sama atau lebih rendah jenjangnya. Pada dasarnya pengawasan ini merupakan perpanjangan tangan bagi pucuk pimpinan (administrator tertinggi) dalam organisasi yang besar itu untuk melakukan pengawasan melekat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengawasan Ekstern

Kata ekstern berarti pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan dari luar organisasi yang dikenai pengawasan. Pengawasan seperti itu tergantung dari cara melihat kedudukan organisasi sebagai total sistem. Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi kerja yang tugas pokoknya melaksanakan pengawasan disebut juga Pengawasan Fungsional.

Sedangkan menurut Sudibyo Triatmojo (2000:13), pengawasan memiliki beberapa jenis berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda, yaitu jenis pengawasan menurut waktu melaksanakan pengawasan (dilakukan sebelum kegiatan dimulai, selama kegiatan sedang berlangsung, sesudah kegiatan selesai dilaksanakan), selanjutnya berdasarkan cara melaksanakan pengawasan (langsung, dan tidak langsung), terakhir berdasarkan subyek yang melaksanakan pengawasan (fungsional pengawasan melekat, pengawasan (Wasnal), pengawasan legislatif, pengawasan masyarakat). Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis pengawasan di atas :

A. Jenis pengawasan menurut waktu melaksanakan pengawasan

- 1) Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai
Dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan petunjuk operasionalnya, persetujuan terhadap rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat/instansi yang lebih rendah.

- 2) Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan sedang dilakukan
Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyatadicapai dengan yang seharusnya telah dan seharusnya dicapai dalam waktu selanjutnya. Demikian pentingnya pengawasan ini, sehingga perlu dikembangkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan-kemungkinan timbulnya penyimpangan, kesalahan dan kegagalan.
- 3) Pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan selesai dilaksanakan
Pengawasan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil serta memandang bahwa hasil-hasil historikal mempengaruhi tindakan-tindakan masa mendatang.

B. Jenis pengawasan menurut cara melaksanakan pengawasan

- 1) Pengawasan langsung
Pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan berlangsung, misal mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) dan pemeriksaan.
- 2) Pengawasan tidak langsung
Pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat.

C. Jenis pengawasan menurut subyek yang melaksanakan pengawasan

- 1) Pengawasan melekat(Waskat) Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.
- 2) Pengawasan fungsional (Wasnal) Pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, misal: Itjen, Itwilprop/kodya/kab, BPKP, Bepeka.
- 3) Pengawasan legislatif (Wasleg) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun Daerah, pengawasan ini merupakan pengawasan politik.
- 4) Pengawasan masyarakat (Wasmas) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, misal berupa surat pengaduan maupun berita yang dimuat dalam media massa.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan ada dua macam yaitu pengawasan ekstern (pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi) dan pengawasan intern (pengawasan dilakukan oleh pihak dalam organisasi itu sendiri).

2.1.3. Tujuan Pengawasan

Saydam, (2005: 585) mengemukakan dengan istilah tujuan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan melekat (waskat) yaitu: “Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas, kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh atasan langsung.” Atas uraian ini, berikut dikemukakan bahwa dengan pengawasan melekat ini, maka usaha menentukan apa yang sedang dilakukan berupa penilaian atas kinerja yang dihasilkan berdasarkan atas rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan segala usaha membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar yang sudah direncanakan. Selain itu, tindakan pengawasan tersebut juga untuk mengukur tingkat produktivitas kerja yang dicapai atau dari aspek kuantitasnya, serta aspek kualitas atau mutu yang dihasilkan.

Terdapat cara yang memudahkan bagi petugas pengawasan dalam upayanya melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap unit-unit kerja yang ada, yaitu melalui laporan-laporan berisi informasi (misalnya berupa neraca) bagi pimpinan untuk menentukan secara pasti di mana atau mengapa terjadi penyimpangan atas rencana yang ada. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 30/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara No. 93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat, dikemukakan sebagai berikut: “ Tujuan pengawasan melekat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijaksanaan, perencanaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan-kegiatan nyata yang diupayakan oleh setiap pimpinan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut dikemukakan bahwa pengawasan melekat merupakan bagian integral dari manajemen sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai kegiatan pengawasan dan pengendalian yang merupakan salah satu bagian dari manajemen yang merupakan suatu sistem, pengawasan melekat tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek manajemen lainnya seperti perencanaan dan pelaksanaan. Atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan melekat sudah harus dilakukan sejak tahapan perencanaan samapai kepada pelaksanaan pada masing-masing tingkatan. Sebagai salah satu fungsi yang melekat pada setiap pimpinan, pada dasarnya pengawasan melekat dilakukan terhadap seluruh jajaran dibawahnya, tetapi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sehari-hari akan lebih efektif dan efisien apabila setiap pimpinan mengutamakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan langsungnya.

Sedangkan Siagian(2002:73) mengemukakan tentang tujuan pengawasan dengan istilah maksud suatu pengawasan, yaitu sebagai berikut: “Perlu ditekankan bahwa pengawasan juga dimaksudkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengubah perilaku disfungsional atau menyimpang, bukan untuk serta merta mengenakan sanksi atau hukuman, tetapi untuk membantu yang bersangkutan mengubah atau meluruskan perilakunya. Kiatnya, bahwa sasaran utamanya adalah untuk menemukan apa yang tidak beres dalam pelaksanaan berbagai kegiatan operasional dalam organisasi dan bukan serta merta mencari siapa yang salah. Dengan demikian, secara implisit terlihat bahwa pengawasan merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan produktivitas kerja.”

2.1.4. Fungsi-Fungsi Pengawasan

Melihat dari tujuan pengawasan di atas, maka pengawasan ini mempunyai berbagai fungsi pokok, diantaranya adalah sebagai berikut:

- A. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan ataupun penyelewengan.
- B. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, artinya dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan
- C. Untuk mendinamisir organisasi serta segenap kegiatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan. Sehingga setiap bagian yang ada dalam organisasi selalu dalam keadaan yang siap dan selalu berusaha jangan sampai terjadi kesalahan pada bagiannya atau dengan kata lain bahwa setiap bagian yang ada selalu dalam kondisi yang dinamis namun juga terarah dengan sistem manajemen yang mantap pula, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

- D. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, dengan memperhatikan nomor 1 sampai dengan 3 diatas, adanya pengawasan yang rutin mengakibatkan setiap bagian berikut pegawainya akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dilakukan. Sehingga tidak akan muncul tindakan saling menyalahkan dalam pelaksanaan tugas. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, dapat pula ditempuh suatu cara, yakni apabila memang tidak dapat dihindarkan adanya penyimpangan, maka kepada setiap pihak diwajibkan untuk membuat suatu laporan secara tertulis mengenai penyimpangan tersebut (Djati Julistriarsa dan John Suprihanto, 1998:102).

Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat (1997:144) fungsi dari pengawasan diantaranya, yaitu:

- A. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- C. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- D. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, mempertebal rasa tanggung jawab, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut.

2.1.5. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Menurut T. Hani Handoko (1995:373) karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut :

A. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

B. Tepat-waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

C. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

D. Terpusat pada titik-titik pengawasanstrategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidangbidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

E. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

F. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

G. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena

- 1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan
- 2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

I. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

J. Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat (1997:147), "agar pengawasan dapat efektif atau mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka pimpinan harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan". Syarat-syarat yang diperlukan itu antara lain :

1. Pengawasan harus rasional Artinya bahwa pengawasan itu harus dilaksanakan secara wajar dan berdasarkan pada tingkat rasionalitas tertentu. Tidak berdasarkan pada emosi atau perasaan suka dan tidak suka.
2. Pengawasan harus jujur Dalam arti bahwa tidak dimaksudkan terutama untuk menentukan siapa yang salah jika terdapat ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang belum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak benar.

3. Pengawasan harus fleksibel dan luwes. Yaitu bahwa pengawasan harus dijalankan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, serta dapat berubah senafas dengan sifat rencana yang dapat berubah atau luwes pula.
4. Pengawasan harus efisien. Artinya dengan adanya pengawasan, justru akan menghambat usaha peningkatan efisiensi. Oleh sebab itu, pengawasan harus pragmatis, dilihat dari segi-segi kegunaannya.
5. Tidak meninggalkan aspek kemanusiaan. Dalam arti bahwa pengawasan itu tidak boleh dipandang sebagai proses mekanis. Kita tidak hanya mengawasi barang seperti: mesin, alat, bangunan, akan tetapi kita mengawasi pekerjaan orang lain.
6. Dengan menetapkan pedoman kerja yang tidak meninggalkan aspek kemanusiaan, kita mengukur dan mengatur pekerjaan sesuai dengan tujuan, produktivitas yang lebih besar, perhubungan yang lebih mantap dan cepat, serta daya pemuas yang lebih besar.
7. Pengawasan harus bersifat membimbing. Syarat ini dimaksudkan agar supaya para pelaksana meningkatkan kemauan, kemampuan, dan kemahiran untuk melakukan tugas yang dipercayakan pada dirinya.
8. Dari kedua pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa agar proses pengawasan dapat dikatakan efektif pengawasan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus rasional, obyektif, fleksibel, efisien dan menganut aspek kemanusiaan.

2.2 KINERJA PEGAWAI

2.2.1. Kinerja

Kinerja menurut (Timpe 2005:3) adalah sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu dan penekanannya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam periode waktu tertentu.

Selanjutnya menurut Mangkunegara (2000:67), mendefinisikan kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini dibenarkan oleh Nawawi (2006:66), yang menyatakan kinerja dapat diartikan sebagai apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan, sebaliknya kinerja menjadi rendah jika diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan.

Menurut Hasibuan (dalam Yani, 2012:117), mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Selanjutnya menurut Simamora (2003:45) kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya.

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Payaman Simanjuntak (2005:10) menjelaskan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi beberapa faktor, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu:

A. Kompetensi individu

Yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi oleh kebugaran fisik, pendidikan, akumulasi pelatihan dan pengalaman kerja.

B. Dukungan Organisasi

Yaitu setiap orang tergantung pada dukungan organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk pengorganisasian penyediaan sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi dan pengamanan lingkungan kerja termasuk kondisi dan syarat kerja.

C. Dukungan manajemen

Yaitu kinerja suatu organisasi atau individu sangat tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan cara membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerjaan dan memberikan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan agar bekerja secara optimal.

2.2.3. Sasaran Kerja Pegawai

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil pada pasal 1 ayat 4 yang dimaksud dengan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Penilaian SKP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 meliputi aspek:

A. Kuantitas

Kuantitas adalah jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai.

B. Kualitas;

Kualitas adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang di harapkan.

C. Waktu;

Waktu adalah ukuran lamnya proses setiap hasil kerja di capai.

D. Biaya

Biaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.

2.2.4. Perilaku Kerja

Selain dengan sasaran kerja pegawai, prestasi kerja juga diukur dengan indikator perilaku kerja. Parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku kerja adalah:

A. Orientasi Pelayanan

Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang dilayani antara lain masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait dan instansi lain.

B. Integritas

Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi.

C. Komitmen

Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindak pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan atau golongan.

D. Disiplin

Disiplin adalah kesangupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinaan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2.3 Pandangan Islam Terhadap Pengawasan Kinerja Pegawai

Pandangan islam tentang pengawasan kerja merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Adanya pengawasan agar menjamin terlaksananya sebuah kegiatan dengan konsisten, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia.

Dalam dunia pemerintahan pengawasan sangat dibutuhkan agar roda birokrasi tersebut tetap berdiri atas dasar nilai-nilai keislaman. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shof ayat 3:

UIN SUSKA RIAU
شَيْئٌ كُلٌّ عَلَىٰ لَأُخْسَاتًا كُتِبَ اللَّهُ إِنَّ

"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (As-Shof:3)

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran

حَامِدٌ يَوْمَئِذٍ فَسَدَكُمْ قَدْ بَلَغَ أَنْ يَحَامِدُوا وَذَوَا أَعْمَالِكُمْ قَدْ بَلَغَ أَنْ تُوزَنَ (الْحَدِيثُ)

Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

Artinya: "Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain." (HR. Tirmidzi: 2383).

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An- Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya"la Rasulullah bersabda:

شَيْئٌ كُلٌّ عَلَى لَأَخْسَانًا كَتَبَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu." (HR. Bukhari: 6010)

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nopita Sari Siregar (2017)	Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Upt Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Riau	Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pegawai Pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang BAPENDA Riau bahwasannya sejauh ini kinerja pegawai sudah cukup baik dikarenakan beberapa program kerja sudah terrealisasi memenuhi target yang telah ditentukan.	Terdapat perbedaan pada kedua penelitian tersebut, pada penelitian terdahulu Menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, Meningkatkan produktivitas, menemukan hambatan kinerja, dan mencari solusi untuk meningkatkan hasil kerja. Sedangkan penulis Mengawasi dan memastikan pegawai bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan serta Memastikan kepatuhan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau				jika diperlukan.
	Fadli Sandewa (2019)	Pengawasan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut (Studi Tentang Pengawasan Camat Terhadap Kinerja Aparatur Di Kecamatan Banggai)	Dalam pengawasan yang di lakukan camat di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Bangai laut tentang Pengawasan Langsung belum optimal berjalan atau maksimal dalam mengawasi kinerja para pegawai, sedangkan Pengawasan Tidak Langsung lingkungan kantor kecamatan Banggai belum berjalan dengan semaksimal mungkin sehingga para pegawai dapat merasakan dampaknya dan mempengaruh kinerja pegawai.	kedua penelitian tersebut dapat memiliki fokus yang sama pada pengawasan kinerja pegawai, namun variabel-variabel yang mempengaruhi dan hasilnya dapat berbeda berdasarkan konteks dan karakteristik organisasi yang bersangkutan.
State Islamic University of Sultan Sharif I	Muhammaddul Muchtadi	Pengaruh Disiplin Kerja	Berdasarkan hasil penelitian	Terdapat perbedaan pada kedua peneliian tersebut, pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2022)	Dan Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	mengennai disiplin kerja dan pengawasan terhadap kinerja pegawai biro umum secretariat daerah provisi riau sejauh ini sudah cukup baik karena semakin tinggi pengaruh pengawasan disiplin kerja yang dilakukan maka kinerja pegawai akan semakin meningkat.	penelitian terdahulu Penelitian ini meneliti dua variabel utama, yaitu disiplin kerja dan pengawasan kerja, serta bagaimana kedua variabel ini mempengaruhi kinerja pegawai. Fokusnya adalah pada kombinasi antara disiplin kerja dan pengawasan dalam konteks biro umum pemerintahan provinsi. Sedangkan penulis lebih fokus pada pengawasan kinerja pegawai saja, tanpa menyertakan variabel disiplin kerja. Fokusnya adalah pada bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan di sekretariat DPRD kabupaten mempengaruhi kinerja pegawai.
Mardiah Harahap (2020)	Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Pekanbaru	Pengawasan Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru mempunyai hambatan-hambatan yang di alami yaitu keterbatasan waktu, belum adanya hukuman	Terdapat perbedaan tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu meneliti di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Pekanbaru, sedangkan penulis meneliti di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			yang berlaku bagi para pegawai yang melakukan kesalahan serta perbedaan karakter masing-masing dari pegawai	
Elly Nielwaty, Prihati, Sulaiman Zuhdi (2017)	Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau	hasil dari kegiatan sebagai bahan evaluasi menentukan kebutuhan tindakan korektif untuk kegiatan dimasa yang akan datang sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sub Bidang Pengawasan Barang dan Jasa di Disperindag Provinsi Riau.	Penelitian pada Disperindag Provinsi Riau mungkin fokus pada pengawasan terhadap kinerja pegawai yang terkait dengan pengelolaan barang dan jasa, sedangkan penelitian di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak mungkin lebih berkaitan dengan pengawasan kinerja pegawai dalam konteks pelayanan publik atau administrasi pemerintahan daerah.	
Dony Suhariyanto Dan Tanto Askriyandoko Putro (2018)	Analisis Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Cv	Dengan bekal keahlian pada bidangnya maka CV Tiga Putra sangat yakin dapat	Jurnal ini hanya mengukur kinerja secara individual sementara peneliti mengukur kinerja secara individual dan juga kinerja secara tim.	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tiga Putra	mewujudkan keinginan para konsumen menjadi kenyataan dan sesuai standar, kualitas terbaik serta harga yang terjangkau.	
Rida Arrasid (2021)	Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	Kinerja aparatur sipil negara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru dari aspek kemampuan kerjasama sudah baik terlihat dari pegawai bekerja tim work dan saling menghargai rekan kerja. Demokrasi ide dan inovasi sangat dibutuhkan setiap bidang-bidang yang ada	Terdapat perbedaan tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu meneliti di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru, sedangkan penulis meneliti di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak
Rio Marpaung dan Tri Dinda Agustin (2013)	Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai	pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja	memiliki fokus yang sama pada pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, namun variabel-variabel yang mempengaruhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejaksanaan Tinggi Riau	pegawai Kejaksanaan Tinggi Riau, sedangkan disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kejaksanaan Tinggi Riau.	dan hasilnya dapat berbeda berdasarkan konteks dan karakteristik organisasi yang bersangkutan.
Nurtika Sari (2015)	Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematangsiantar	kinerja pegawai berdasarkan indikator kesetiaan, prestasi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar berada pada nilai 4,25 dengan kriteria sangat baik, namun masih perlu diperhatikan lagi tentang pengawasan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		agar pegawai selalu masuk kerja tepat waktu	
--	--	---	--

2. Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas masih bersifat abstrak, oleh sebab itu agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis akan memasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada tinjauan pustaka.

Definisi konsep adalah batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikut, dimaksud agar dapat memberikan arah dalam penulisan bagian berikut, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah proses yang sistematis dan terencana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan aktivitas serta perilaku dalam organisasi atau lingkungan tertentu. Pengawasan melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas, pengumpulan informasi tentang kinerja, dan jika diperlukan, pengambilan tindakan korektif untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
2. Kinerja pegawai mengacu pada evaluasi hasil kerja dan kontribusi yang diberikan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tempat kerja. Penilaian kinerja pegawai sering kali melibatkan pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap pencapaian hasil kerja serta kemampuan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masa mendatang.

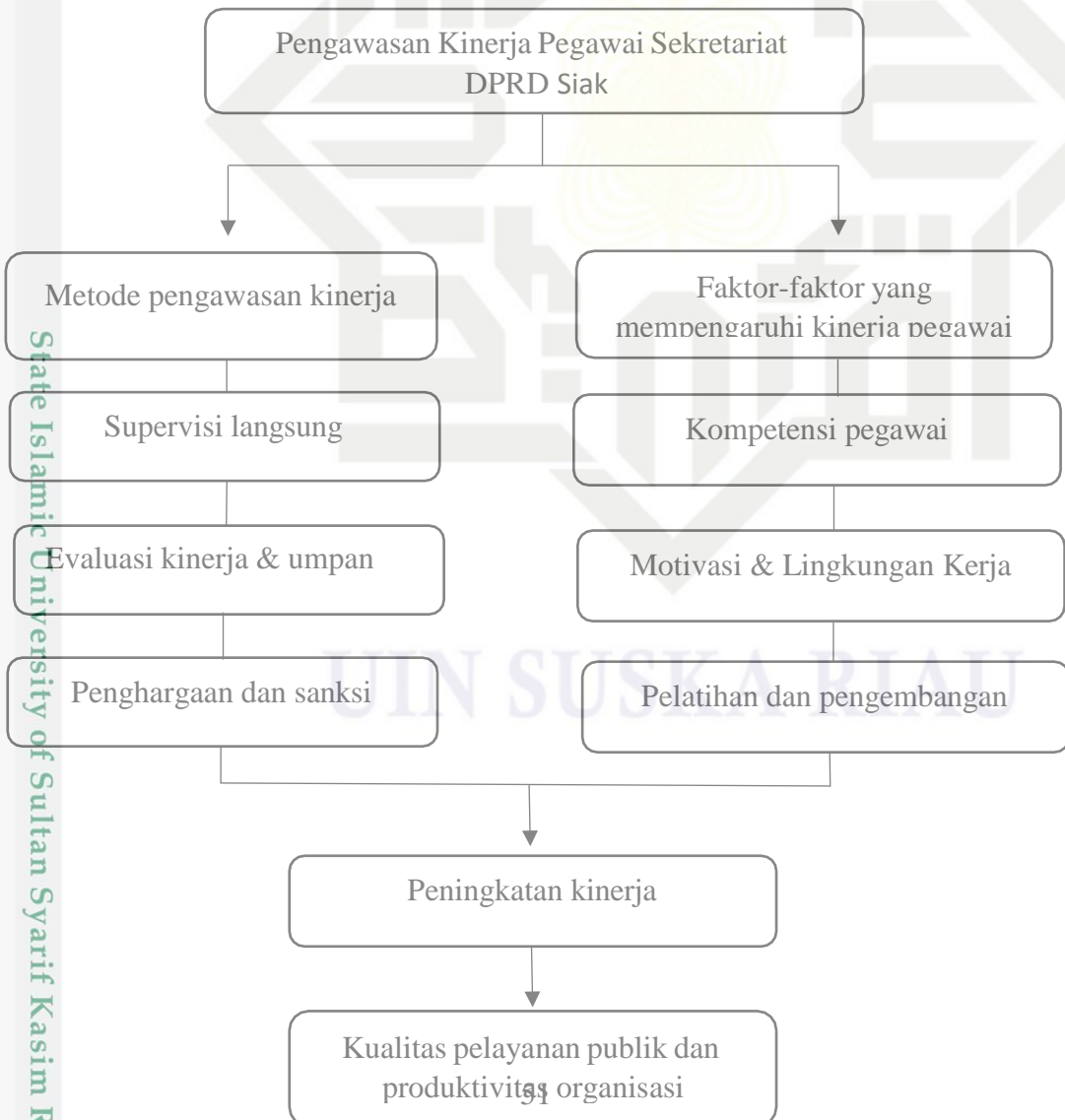
2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional ini dapat dikatakan sebagai unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi tercapainya hal yang diinginkan dan sebagai acuan dalam mencapai target. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep operasional dari indikator pengawasan kinerja pegawai yang dijelaskan dalam buku Samsudin yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2005, yaitu:

No.	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	Persentase pencapaian target kinerja	Pengawasan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pencapaian target kinerja • Rata-rata waktu yang Diperlukan untuk mencapai target
2.	Tingkat kehadiran pegawai	Mentoring harian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian tugas harian sesuai deadline • Kehadiran fisik dan virtual pegawai
3.	Kualitas hasil kerja (jumlah tugas sesuai standar)	Evaluasi hasil kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan antara hasil kerja dengan standar kualitas yang diharapkan



2.7 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena di Kantor Sekretariat Dewan perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Siak masih banyak pegawai yang kurang disiplin dengan tanggung jawab mereka sehingga pengawasan perlu dilakukan oleh pimpinan kantor agar bisa diketahui apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan dan disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi.

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti demi memberi informasi dan data yang valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada dilapangan. Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil.

3.2. Lokasi dan waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Siak, yaitu pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak yang beralamatkan di Jl. Panglima Ghimbam No. 2, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773 Dimulai pada Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data Adapun dalam penelitian ini terdapat jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu:

3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu dari pemimpin dan sebagian pegawai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jika data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, dll. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Buku, jurnal, Skripsi, perpustakaan dan website/internet.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Rekaman wawancara merupakan kumpulan informasi yang digali melalui tanya jawab lisan dan percakapan sehari-hari. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dipandu oleh kisi-kisi pertanyaan tertulis yang disediakan sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak direncanakan, topik pembicaraan bersifat bebas, dapat terjadi kapan dan dimana saja, serta pertanyaan bersifat spontan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Dimana pada awalnya penulis akan menyiapkan draft wawancara yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada informan penelitian atau narasumber yaitu dari pihak pegawai pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan yang bersifat pribadi seperti buku harian, surat-surat, atau catatan lapangan. (Syamsudin 2014) Pada penelitian ini, penulis akan mengambil dokumentasi dari pelaksanaan wawancara yang telah dilakukan dan mengambil data dari pegawai pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Siak pada saat melaksanakan program mahasiswa peduli stunting, dimana data tersebut berupa dokumentasi atau foto-foto pada saat melaksanakan program tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrumen untuk merekam dan mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. (Syamsudin 2014) Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pengawasan kinerja pegawai yang ada pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Siak

3.5 Teknik Sampling

Teknik sampling pada penelitian empirik merupakan sebuah proses pemilihan atau penentuan sampel. Secara konvensional, konsep sampel atau contoh menunjuk kepada bagian dari populasi. Akan tetapi, didalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi, melainkan lebih dominan kepada representasi terhadap fenomena sosial. Informasi maupun data harus ditelusuri dengan baik dan seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hal tersebut dapat membantu penulis dalam mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. (Bungin 2012)

Sugiyono mengatakan dalam bukunya bahwa didalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, contohnya yaitu dimana informan atau orang tersebut dianggap paling mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang apa yang kita harapkan. (Sugiyono 2009) Dalam prosedur sampling, hal yang paling penting adalah tentang bagaimana cara menentukan informan kunci atau *key informan* atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Dalam hal ini, informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau mempunyai tujuan yaitu dengan *purposive sampling*. (Bungin 2012)

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang diartikan dalam penelitian kualitatif merupakan berbentuk perlengkapan yang dipakai dalam pengumpulan data pengamatan, wawancara dan dokumen. Jadi pengumpulan data pengamatan harus dibuatkan instrumen atau alat, seperti itu juga pada tanya jawab dan dokumen harus dibuatkan instrumen penelitian.

3.7 Validitas Data

Validitas data didalam penelitian kualitatif berperan sebagai usaha dalam rangka meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah baik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, validitas data yang digunakan adalah triangulasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Moleong 2005) Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguji keabsahan data dan informasi yang tidak dapat dilakukan dengan alat-alat statistik. Begitu juga dengan materi kebenaran yang tidak diuji berdasarkan kebenaran alat, sehingga substansi kebenaran tergantung kepada kebenaran intersubjektif. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder. (Bungin 2012) Dalam penelitian ini metode triangulasi yang digunakan oleh penulis adalah pemeriksaan melalui sumber dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong 2005) Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum penulis terjun ke lapangan, dan berlangsung terus menerus hingga penulisan hasil penelitian. (Sugiyono 2009)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dibawah ini merupakan teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman:

- a. Pengumpulan Data Langkah pertama yaitu dimulai dengan menggali data dari berbagai macam sumber, yaitu dengan cara wawancara, pengamatan, yang kemudian akan dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen resmi, dokumen pribadi, foto, gambar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data Dalam hal ini, reduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila dibutuhkan.
- c. Penyajian Data Setelah data direduksi, tahapan selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan Kesimpulan Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya. (Sugiyono 2009)

3.9 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Informan dari penelitian ini adalah:

- a. Sekrtaris DPRD Kab.Siak
- b. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab.Siak
- c. *Penyusun Rencana dan Anggaran Sekretariat DPRD Kab.Siak*

3.10 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan, paparan sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maksudnya. Dan penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik itu saat pengumpulan data ataupun setelah pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang sifatnya khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian akan dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat general. Jadi penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan selanjutnya akan mengembangkan suatu teori dari data tersebut.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Siak

4.1.1. Sejarah berdirinya instansi

Kabupaten Siak merupakan daerah bekas Kerajaan Siak yang didirikan pada tahun 1.723 Masehi oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahman Syah, diawal kemerdekaan Indonesia Sultan Syarif Kasim II merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian menjadi wilayah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Siak Sri Indrapura.

Pada tanggal 10 Juli 1948, Pemerintah Indonesia saat itu meresmikan Undang -undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang - undang pokok tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal 2 UU ini, Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Sekretaris dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas membantu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memdudukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.1.2. Bagian dan unit kerja

Sekretaris DPRD dibantu oleh Pejabat Eselon III.a yang terdiri dari Kepala Bagian. Adapun jumlah kepala Bagian yang ada di Sekretariat DPRD ada 3 orang yaitu :

1. Kepala Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Humaas Dan Protokol
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga
2. Kepala Bagian Keuangan
 - a) Sub bagian anggaran
 - b) Sub bagian perbendaharaan
 - c) Sub bagian pembukuan dan verifikasi
3. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
 - a) Sub bagian persidangan
 - b) Sub bagian risalah dan arsip
 - c) Sub bagian perundang-undangan

4.1.3. Struktur Organisasi Unit Kerja

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta tata Kerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.1.4. Visi dan misi

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak dijabarkan sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PRIMA YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN BERKUALITAS DALAM RANGKA Mendukung Kelancaran Kegiatan TRI FUNGSI DPRD KABUPATEN SIAK UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIAK KE DEPAN"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Misi

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana.
- 3) Meningkatkan pelayanan yang prima dalam setiap kegiatan DPRD.

Untuk mencapai Visi dan Misi diatas diperlukan dasar-dasar nilai yang harus ditanamkan dalam hati setiap personil di Sekretariat DPRD Kabupaten Siak sebagai landasan kerja, dedikasi, prestasi dan loyalitas.

Nilai-nilai yang dipakai sebagai rujukan etika kerja sebagai berikut :

- 1) Profesionalisme
- 2) Bertanggungjawab
- 3) Transparan
- 4) Jujur
- 5) Objektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diterapkan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pengawasan yang dilakukan melalui evaluasi rutin, pemberian arahan secara langsung, serta monitoring yang intensif terhadap pelaksanaan tugas pegawai terbukti efektif dalam menjaga disiplin dan memastikan bahwa pegawai tetap fokus pada target yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan yang transparan dan berkesinambungan memberikan pegawai pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi dan tanggung jawab mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih maksimal.

Namun, dalam upaya untuk mencapai kinerja yang optimal, terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Faktor-faktor seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memadai, kurangnya koordinasi antarbagian yang sering menghambat kelancaran alur pekerjaan, serta terbatasnya pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada pegawai, menjadi tantangan besar dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu, kendala teknis seperti keterlambatan dokumen, masalah infrastruktur, dan keterbatasan teknologi juga turut memengaruhi produktivitas pegawai di kantor tersebut. Meskipun demikian, pengawasan yang baik dapat membantu mengidentifikasi masalah tersebut lebih awal,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga solusi yang tepat dapat segera diterapkan.

SARAN

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa kekurangan yang ada pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, maka peneliti memberikan saran agar system pengawasan kinerja pegawai berjalan dengan baik dengan semestinya, serta kedepannya berjalan dengan baik. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

6.2.1. Penguatan Sistem Pengawasan

Pengawasan yang sudah diterapkan perlu diperkuat dengan meningkatkan frekuensi evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pegawai. Pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis hasil dapat mendorong pegawai untuk lebih fokus pada target kinerja yang telah ditetapkan. Disarankan untuk menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang memudahkan pemantauan real-time terhadap kinerja dan aktivitas pegawai, serta memungkinkan pemberian umpan balik yang lebih cepat dan konstruktif.

6.2.2. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi Antarbagian

Faktor penghambat yang terkait dengan kurangnya koordinasi antarbagian perlu segera diatasi dengan meningkatkan komunikasi antarunit kerja. Saran yang dapat diberikan adalah membentuk tim koordinasi atau pertemuan rutin antarbagian untuk membahas kendala dan mencari solusi bersama. Hal ini akan mempermudah alur kerja dan mempercepat penyelesaian tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2.3. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Untuk mengurangi hambatan terkait kurangnya keterampilan atau pengetahuan di kalangan pegawai, penting bagi Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak untuk memperbanyak program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu pegawai untuk lebih terampil dalam menjalankan tugasnya, serta memperkenalkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, pengembangan soft skills seperti manajemen waktu dan komunikasi juga perlu diberikan untuk mendukung peningkatan kualitas kerja.

6.2.4. Pembaruan Infrastruktur dan Teknologi

Masalah terkait infrastruktur dan keterlambatan dokumen yang menjadi faktor penghambat dalam kinerja pegawai perlu segera diatasi. Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Siak disarankan untuk melakukan pembaruan terhadap infrastruktur yang ada, baik dari segi fasilitas fisik maupun teknologi informasi. Penggunaan aplikasi manajemen tugas atau sistem digital yang lebih efisien dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Siak tahun 2021-2026

Aiifin, M. (2020). *Manajemen Kinerja Pegawai*. Jakarta: Penerbit Aulia.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fathoni, Abdurrahmat. (2016). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta,

Graha Ilmu. Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Handi, D., Zulwisman, Z., & HB, G. *Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2024, 10 (3), 976-986

Handoko, T. Hani, (2012). *Manajemen*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE

Hasan, I. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Surabaya: Penerbit Ilmu Sosial.

Hasibuan, Malayu S.P, (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta

Iskandar, A. (2019). *Manajemen Kinerja Pegawai di Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Pemerintahan.

Nielwaty, Elly. Dkk, (2017), *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau*, Jurnal Niara. Pekanbaru, Jurnal Niara, Vol. 10, No. 1 Juli 2017, Hal. 1-5.

Nurhayati, L., & Setiawan, B. (2020). *Efektivitas Pengawasan dalam*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Administrasi.

Marpaung, Rio & Tri Dinda Agustin. (2013). *Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Tinggi Riau*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Tahun III No. 8, Maret 2013 : 141 -1 64.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Prasetyo, B., & Lestari, T. (2019). *Efektivitas Pengawasan dalam Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Administrasi.

Putra, D., Yulia, R., & Setiadi, M. (2018). *Pengawasan dan Produktivitas Kerja di Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Akademika.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Manajemen*(13th ed.). Pearson. Rusdi, R., & Al Kadafi, M. (2017). *Admiinistrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.

Sandewa, Fadli. (2019), *Pengawasan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut (Studi Tentang Pengawasan Camat Terhadap Kinerja Aparatur Di Kecamatan Banggai)*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4, April 2017 hlm 150-159.

Santoso, T., Harmono, S., & Wijaya, A. (2021). *Pengawasan dan Produktivitas Kerja*. Yogyakarta: Penerbit Akademika.

Samsudin, Saidili. (2005). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: PUSTAKA SETIA

Sastrohadiwiryo, S. (2014). *Metode Penelitian Manajemen* (Cetakan Ke 3). Bandung: Alfabeta Bandung

Sugian. Sondang P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta:

Sinungan, Muchdarsyah. (2013). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Cetakan ke-9. Jakarta: Bumi Aks

Siswanto. (2017). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

Suharto, R. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Surabaya: Penerbit Ilmu Sosial.

Sutrisno, Edy. (2012), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada*. Media Group, Jakarta

Suhartini, (2012). *Kinerja Pegawai*, Makassar : Alauddin University press.

Syamsudin, Amir. 2014. "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 3 (1): 403–13. <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>.

Wursanto. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Personalia*. Jakarta: Dian Pustaka

Peraturan dan perundang-undangan :

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) tentang pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-undang pasal 15 No.05 Tahun 2014 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Daftar dokumentasi wawancara



Wawancara dengan bapak sekretaris DPRD Kab. Siak



Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Wawancara dengan Penyusun Rencana dan Anggaran
Sekretariat DPRD Kab.Siak*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7005/Un.04/F.VIII/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 24 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada
Yth. Dr. JHON AFRIZAL, S.H.I. M.A.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nur Atika
NIM : 12070522843
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"ANALISIS PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAG"

Demikian disampaikan. atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Pekanbaru
Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Kin. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4657/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 02 Juli 2024 M
25 Zulhijjah 1445 H

Kepada
Yth. Dr. Jhon Afrizall, SHI, MA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Nur Atika
NIM	: 12070522843
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAK".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5108/Un.04/F.VII/PP.00.9/7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 18 Juli 2024 M
11 Muharram 1446 H

Kepada
Yth. Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Siak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Atika
NIM. : 12070522843
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Pengawasan Kinerja Pegawai pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK**

JL. PANGLIMA GHIMBAM NO. 2 TELP. (0764) 3240411, FAX. (0764) 3240409
SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 070/Sekwan/321. a

Yang bertanda tanga dibawah ini Sekretaris DPRD Kabupaten Siak, dengan ini menerangkan :

Nama : NUR ATIKA
NIM/NIK KTP : 12070522843
Progam Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Sungai Apit Desa Sungai Apit Rt/Rw 003/006 Kecamatan
Sungai Apit Tualang Kabupaten Siak

Bahwa yang bersangkutan diatas benar telah melakukan Riset pada DPRD Kabupaten Siak pada tanggal 18 Juli 2024 dan hasil data yang diperoleh digunakan untuk Penelitian yang diberi judul:

“ Pengawasan Kinerja Pegawai pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak”

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 22 Juli 2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK

Sekretaris,



H. SETYA HENDRO WARDHANA, SE.SH.MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720606 199703 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur Atika lahir di Sungai Apit, 07 November 2001, merupakan anak Ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Nur dan Ibu Siti Aisyah. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 11 Sungai Apit dan lulus pada tahun 2014. Lalu Penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Negeri 2 Siak dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Sungai Apit Jurusan IPA dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIAK”** dibawah bimbingan langsung oleh Bapak Dr. Jhon Afrizal S.H.I. MA berdasarkan ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial, Jurusan Administrasi Negara pada Rabu, 14 Januari 2025 penulis dinyatakan **LULUS** Dan Berhasil Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU